

PEREMPUAN PEKERJA DI ERA KAPITALISME: ANALISIS BEBAN GANDA DAN PERLINDUNGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Jumarni Dalle¹, Rasdiana²

¹²Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: jumarni.dalle@uin-alauddin.ac.id¹, rasdiana@uin-alauddin.ac.id²

Abstrak:

Perkembangan kapitalisme modern telah membawa perubahan terhadap posisi dan peran perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan banyak perempuan terlibat dalam dunia kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun keterlibatan perempuan dalam sektor publik juga melahirkan berbagai persoalan seperti beban ganda, eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi upah, serta minimnya perlindungan terhadap perempuan pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perempuan pekerja di era kapitalisme, faktor-faktor yang menyebabkan perempuan bekerja, bentuk eksploitasi dan beban ganda yang dialami perempuan pekerja, serta perlindungan perempuan pekerja dalam perspektif hukum Islam. Penelitian ini juga menekankan pentingnya integrasi perlindungan sosial dan nilai-nilai keadilan Islam dalam menghadapi eksploitasi perempuan pekerja di sistem kapitalisme modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan sosiologis melalui pengkajian berbagai literatur, jurnal ilmiah, serta sumber hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan pekerja di era kapitalisme rentan mengalami beban ganda, eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi, dan kekerasan di lingkungan kerja akibat tuntutan ekonomi serta ketimpangan relasi sosial dalam masyarakat. Islam tidak melarang perempuan bekerja selama tetap berada dalam batas-batas syariat dan tidak melalaikan tanggung jawab dalam keluarga. Islam juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak, martabat, dan keselamatan perempuan pekerja. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi perempuan pekerja dari eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan dalam dunia kerja.

Kata Kunci: *Perempuan pekerja, kapitalisme, beban ganda, hukum Islam, perlindungan perempuan*

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem kapitalisme modern telah membawa perubahan besar terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk perubahan terhadap posisi dan peran perempuan dalam dunia kerja. Kapitalisme tidak hanya mengubah sistem produksi ekonomi, tetapi juga membentuk pola relasi sosial dan pembagian peran gender dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Perempuan yang sebelumnya lebih banyak ditempatkan dalam wilayah domestik kini mulai terlibat aktif dalam berbagai sektor publik seperti industri, pendidikan, kesehatan, perdagangan, hingga sektor jasa dan digital. Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja dipandang sebagai bagian dari perkembangan sosial modern sekaligus bentuk partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi keluarga dan negara. (Nur Indah Amelia, 2025)

Meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak dapat dilepaskan dari perkembangan kapitalisme yang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar. Kapitalisme tidak hanya mengubah sistem ekonomi masyarakat, tetapi juga memengaruhi pola relasi sosial dan budaya dalam kehidupan keluarga. Dalam praktiknya, sistem kapitalisme sering menjadikan perempuan sebagai tenaga kerja murah dengan jam kerja panjang dan perlindungan kerja yang minim. Perempuan sering kali berada dalam posisi rentan terhadap diskriminasi upah, eksploitasi tenaga kerja, dan kekerasan di lingkungan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kapitalisme tidak selalu menghadirkan kebebasan bagi perempuan, tetapi juga melahirkan bentuk baru eksploitasi terhadap perempuan pekerja. (Nur Indah Amelia, 2025)

Dalam sistem kapitalisme, perempuan sering dijadikan tenaga kerja fleksibel karena dianggap memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Perempuan lebih mudah diarahkan pada pekerjaan dengan upah rendah, sistem kerja kontrak, dan perlindungan kerja yang minim akibat tekanan ekonomi dan kebutuhan keluarga. Relasi kuasa dalam sistem kapitalisme bekerja melalui dominasi pemilik modal terhadap pekerja perempuan yang berada pada posisi rentan secara sosial maupun ekonomi. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan tidak hanya menjadi bagian dari sistem produksi ekonomi, tetapi juga menjadi objek eksploitasi struktural yang dilegitimasi melalui kebutuhan ekonomi dan budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat.

Realitas perempuan pekerja di era kapitalisme menunjukkan adanya ketimpangan antara tuntutan ekonomi dan perlindungan terhadap perempuan. Tidak sedikit perempuan menjadi korban eksploitasi tenaga kerja, diskriminasi upah, pelecehan seksual, hingga minimnya perlindungan hukum di tempat kerja. Kerentanan perempuan pekerja juga terlihat dari masih tingginya kasus kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan di lingkungan kerja. Perempuan pekerja tidak hanya menghadapi persoalan diskriminasi upah dan beban kerja, tetapi juga rentan mengalami kekerasan verbal, intimidasi, pelecehan seksual, dan penyalahgunaan relasi kuasa di tempat kerja.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan pekerja masih berada pada posisi yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan hukum dan sosial yang lebih kuat.

Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan Tahun 2025 menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 376.529 kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan, meningkat 14,07% dibanding tahun sebelumnya. Ranah personal masih mendominasi dengan 337.961 kasus, sementara ranah publik tercatat sebanyak 17.252 kasus dan ranah negara sebanyak 2.707 kasus. Selain itu, kekerasan seksual menjadi bentuk kekerasan yang paling banyak dilaporkan, yaitu sebesar 37,51%, disusul kekerasan psikis, fisik, dan ekonomi. Data tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih berada pada posisi rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan akibat ketimpangan relasi kuasa dan lemahnya perlindungan terhadap perempuan dalam kehidupan sosial maupun dunia kerja. (Komnas Perempuan, 2026)

Selain faktor perkembangan ekonomi modern, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga dipengaruhi oleh meningkatnya tuntutan ekonomi keluarga. Tingginya biaya hidup menyebabkan banyak perempuan harus ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Tidak sedikit perempuan yang bekerja karena penghasilan suami tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan dalam beberapa kondisi, perempuan menjadi tulang punggung keluarga karena berstatus janda atau harus menanggung kebutuhan keluarga secara mandiri. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perempuan bekerja bukan semata-mata karena faktor aktualisasi diri, tetapi juga karena tuntutan ekonomi yang semakin berat. (M. Riadul Minan, Baiq Ratna Mulhimmah, 2025)

Di sisi lain, keterlibatan perempuan dalam sektor publik tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab domestik yang selama ini dilekatkan kepada perempuan. Banyak perempuan tetap dituntut menjalankan pekerjaan rumah tangga, mengurus anak, melayani suami, dan mengelola kebutuhan keluarga meskipun mereka juga bekerja di luar rumah. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan mengalami beban ganda, yaitu menjalankan peran domestik sekaligus peran publik dalam waktu yang bersamaan. Budaya patriarki yang masih kuat di masyarakat menyebabkan pekerjaan domestik tetap dianggap sebagai tanggung jawab utama perempuan sehingga perempuan sering mengalami tekanan fisik maupun psikologis akibat beban kerja yang berlebihan.

Dalam perspektif Islam, perempuan memiliki kedudukan yang mulia dan memperoleh hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, termasuk dalam bidang pekerjaan. Islam memperbolehkan perempuan bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam batas-batas syariat dan tidak menghilangkan tanggung jawab utama dalam keluarga. Pada masa awal Islam, perempuan juga terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi. Khadijah binti Khuwailid dikenal sebagai perempuan pebisnis yang

sukses, sementara perempuan lain juga terlibat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kepada perempuan untuk bekerja dan berkontribusi dalam masyarakat. (Nasution, 2017)

Meskipun demikian, Islam tetap memberikan aturan terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik. Perempuan diwajibkan menjaga kehormatan diri, menutup aurat, menjaga adab pergaulan, serta menghindari aktivitas yang dapat menimbulkan kemudharatan. Selain itu, pekerjaan perempuan tidak boleh menyebabkan hilangnya tanggung jawab dalam membina keluarga dan mendidik anak. Islam memandang bahwa keseimbangan antara peran publik dan domestik merupakan bagian penting dalam menjaga ketahanan keluarga dan masyarakat. (Ria Irwana et al., 2023)

Berbagai penelitian sebelumnya umumnya membahas perempuan pekerja dari perspektif gender, ekonomi keluarga, psikologi, atau hukum Islam secara parsial. Penelitian mengenai perempuan pekerja dalam sistem kapitalisme lebih banyak menyoroti fenomena beban ganda dan keterlibatan perempuan dalam sektor publik tanpa menganalisis secara kritis bagaimana relasi kuasa kapitalisme dan budaya patriarki bekerja dalam membentuk eksploitasi terhadap perempuan pekerja. Selain itu, kajian hukum Islam mengenai perempuan bekerja cenderung berfokus pada batasan normatif perempuan di ruang publik dan belum banyak mengaitkannya dengan perlindungan sosial terhadap perempuan pekerja di era kapitalisme modern. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan perspektif gender, kapitalisme, relasi kuasa, dan hukum Islam dalam menganalisis problematika perempuan pekerja kontemporer.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perempuan pekerja di era kapitalisme, faktor-faktor yang menyebabkan perempuan bekerja, bentuk eksploitasi dan beban ganda yang dialami perempuan pekerja, serta perlindungan perempuan pekerja dalam perspektif hukum Islam.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Teori Gender dan Peran Sosial Perempuan

Gender merupakan konstruksi sosial yang membedakan peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Perbedaan tersebut tidak hanya dipengaruhi faktor biologis, tetapi juga dibentuk oleh budaya, nilai sosial, dan sistem yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Dalam budaya patriarki, perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat sehingga mengalami ketidakadilan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan pekerjaan. Bentuk ketidakadilan tersebut dapat berupa marginalisasi ekonomi, stereotip, subordinasi, kekerasan, dan beban kerja yang lebih besar terhadap perempuan. (Cito Meriko, 2019).

Dalam perkembangan masyarakat modern, isu kesetaraan gender semakin berkembang seiring meningkatnya kesadaran perempuan terhadap hak-haknya. Perempuan mulai memperoleh akses yang lebih luas dalam pendidikan, pekerjaan, dan aktivitas sosial. Namun demikian, perempuan yang bekerja tetap sering dipandang memiliki tanggung jawab utama dalam urusan domestik sehingga muncul fenomena peran ganda perempuan. Perempuan tidak hanya dituntut berhasil di ruang publik, tetapi juga tetap harus menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga, pengasuh anak, dan pengelola keluarga. (Santoso & Handoyo, 2025)

Dalam sejarah peradaban dunia, perempuan sering ditempatkan pada posisi subordinat dan mengalami berbagai bentuk ketidakadilan sosial. Namun Islam hadir dengan memberikan penghormatan terhadap perempuan serta menempatkan perempuan sebagai manusia yang memiliki hak dan kedudukan mulia. Islam memberikan ruang bagi perempuan untuk memperoleh pendidikan, berpartisipasi dalam kehidupan sosial, dan memperoleh hak-hak kemanusiaan secara layak. (Azizah, 2020)

Kesadaran gender telah membuka ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, termasuk dalam bidang ekonomi dan pekerjaan. Perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai pelengkap rumah tangga, tetapi juga memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan dan pembangunan sosial masyarakat. (Saguni, 2020)

Menurut Suryakusuma, ideologi “ibuisme negara” membentuk pandangan bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang mampu mengurus keluarga tanpa meninggalkan kewajibannya. Akibatnya, perempuan sering mengalami tekanan sosial untuk berhasil menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran domestik dan publik. Jika perempuan gagal menjalankan salah satu peran tersebut, maka perempuan dianggap gagal dalam menjalankan fungsi sosialnya. (Cito Meriko, 2019)

2. Kapitalisme dan Eksploitasi Perempuan Pekerja

Dalam perspektif teori sosial, kapitalisme dipahami sebagai sistem ekonomi yang berorientasi pada akumulasi keuntungan melalui penguasaan modal dan tenaga kerja. Sistem ini menempatkan tenaga kerja sebagai bagian penting dalam proses produksi sehingga hubungan kerja sering dipengaruhi kepentingan ekonomi dan produktivitas. Dalam perkembangannya, perempuan menjadi salah satu kelompok yang banyak terlibat dalam sistem kerja kapitalistik karena dianggap memiliki fleksibilitas dan biaya tenaga kerja yang lebih rendah dibanding laki-laki. (Nur Indah Amelia, 2025)

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam sistem kapitalisme sering mengalami beban ganda dan subordinasi sosial akibat relasi gender yang tidak seimbang. (Tebaldi, 2021)

Dalam sistem kapitalisme, perempuan sering ditempatkan sebagai tenaga kerja fleksibel karena dianggap memiliki posisi tawar yang lebih lemah dibanding laki-laki sehingga lebih mudah diarahkan pada pekerjaan dengan upah rendah dan perlindungan

kerja yang minim. Konsep beban ganda perempuan muncul dalam teori gender yang menjelaskan bahwa perempuan sering menjalankan dua peran sekaligus, yaitu peran domestik dan publik. Dalam masyarakat patriarki, tanggung jawab domestik tetap dilekatkan kepada perempuan meskipun perempuan juga terlibat dalam aktivitas ekonomi di ruang publik. (Cito Meriko, 2019)

3. Perempuan Bekerja dalam Perspektif Islam

Islam memandang perempuan sebagai manusia yang memiliki kedudukan mulia dan hak yang sama dengan laki-laki dalam memperoleh penghormatan sebagai manusia. Islam tidak melarang perempuan bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam batas-batas syariat dan tidak menimbulkan kemudharatan terhadap diri dan keluarganya. Pada masa Rasulullah saw., perempuan juga aktif dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Dalam perspektif Islam, perempuan diperbolehkan bekerja apabila terdapat kebutuhan atau kemaslahatan dalam pekerjaan tersebut. Beberapa profesi bahkan sangat membutuhkan kehadiran perempuan, seperti bidan, dokter perempuan, guru perempuan, dan tenaga pelayanan sosial lainnya. Islam memandang profesi tersebut sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat yang dapat memberikan manfaat bagi umat.

Meskipun demikian, Islam tetap memberikan aturan terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik. Perempuan diwajibkan menjaga aurat, menjaga kehormatan diri, menjaga adab pergaulan, menghindari khalwat, dan menghindari perilaku tabarruj. Selain itu, pekerjaan perempuan tidak boleh menyebabkan hilangnya tanggung jawab dalam keluarga, terutama dalam mendidik anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. (Nasution, 2017)

Islam juga menegaskan bahwa tanggung jawab utama nafkah keluarga berada pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun dalam kondisi tertentu, perempuan diperbolehkan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau ketika perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Islam memandang pekerjaan perempuan sebagai bentuk ikhtiar yang dibolehkan selama tetap berada dalam batas-batas syariat dan keseimbangan dalam keluarga. (Jumena et al., 2018)

4. Perlindungan Perempuan Pekerja dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, perlindungan terhadap perempuan pekerja merupakan bagian dari upaya menjaga kemaslahatan dan martabat manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kebijakan yang melindungi perempuan pekerja dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. Perlindungan tersebut meliputi pemberian upah yang layak, keselamatan kerja, hak maternitas, serta perlindungan dari pelecehan seksual dan diskriminasi di tempat kerja.

Konsep siyasah dusturiyah dalam hukum Islam menekankan bahwa kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara, termasuk perempuan pekerja. Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan harus memperhatikan kesejahteraan perempuan dan tidak hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata. Perlindungan terhadap perempuan pekerja menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam perspektif Islam. (Adhani, 2024)

Berdasarkan berbagai teori tersebut dapat dipahami bahwa problematika perempuan pekerja di era kapitalisme tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh konstruksi gender, budaya patriarki, dan relasi kuasa dalam sistem sosial modern. Teori gender menunjukkan bahwa perempuan sering mengalami subordinasi dan beban ganda akibat pembagian peran sosial yang tidak seimbang. Sementara teori kapitalisme menjelaskan bahwa perempuan kerap ditempatkan sebagai tenaga kerja fleksibel dengan upah rendah dan perlindungan kerja yang minim demi kepentingan akumulasi keuntungan ekonomi.

Dalam kondisi tersebut, perempuan tidak hanya menghadapi eksploitasi ekonomi dalam dunia kerja, tetapi juga tetap dibebani tanggung jawab domestik dalam keluarga akibat budaya patriarki yang masih berkembang dalam masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa eksploitasi terhadap perempuan pekerja tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga bersifat struktural, sosial, dan kultural.

Di sisi lain, hukum Islam memandang perempuan sebagai manusia yang memiliki martabat, hak, dan kedudukan yang harus dilindungi. Perempuan boleh berpartisipasi dalam dunia kerja selama sesuai prinsip Islam dan keseimbangan dalam keluarga. Selain itu, konsep perlindungan sosial dalam hukum Islam menekankan pentingnya keadilan, perlindungan hak pekerja, serta penghormatan terhadap keselamatan dan martabat perempuan pekerja.

Dengan demikian, penelitian ini memadukan teori gender, teori kapitalisme, hukum Islam, dan perlindungan sosial untuk menganalisis problematika perempuan pekerja secara lebih komprehensif. Penelitian ini menempatkan perempuan pekerja tidak hanya sebagai bagian dari sistem ekonomi modern, tetapi juga sebagai kelompok yang rentan terhadap eksploitasi akibat relasi kuasa kapitalisme dan budaya patriarki sehingga membutuhkan perlindungan sosial dan hukum yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis perempuan pekerja dalam perspektif hukum Islam melalui kajian terhadap Al-Qur'an, hadis, kaidah fikih, dan pandangan ulama kontemporer. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami realitas sosial perempuan pekerja di era kapitalisme modern, khususnya terkait beban ganda, eksploitasi, diskriminasi, dan perlindungan perempuan pekerja.

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berupa Al-Qur'an, hadis, peraturan perundang-undangan, serta pandangan ulama dan literatur hukum Islam yang berkaitan dengan perempuan pekerja. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perempuan pekerja, gender, kapitalisme, relasi kuasa, dan perlindungan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan tema penelitian. Literatur dipilih berdasarkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, keterbaruan penelitian, serta keterkaitan dengan isu perempuan pekerja di era kapitalisme dan perlindungan hukum Islam.

Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur primer dan sekunder yang memiliki keterkaitan tema untuk memperoleh data yang objektif dan relevan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber-sumber ilmiah yang berasal dari jurnal nasional dan internasional untuk memperkuat analisis penelitian.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis dan *content analysis*. Teknik deskriptif digunakan untuk menggambarkan dinamika perempuan pekerja di era kapitalisme, sedangkan *content analysis* digunakan untuk menganalisis bentuk eksploitasi, beban ganda, relasi kuasa, dan perlindungan perempuan pekerja dalam perspektif hukum Islam. Hasil analisis kemudian disusun secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan fokus penelitian.

HASIL DAN DISKUSI

1. Kapitalisme dan Perubahan Peran Perempuan

Perkembangan kapitalisme modern telah membawa perubahan besar terhadap posisi dan peran perempuan dalam masyarakat. Perempuan yang sebelumnya lebih banyak ditempatkan dalam wilayah domestik kini mulai terlibat aktif dalam berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan sektor jasa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi hanya diposisikan sebagai pelengkap rumah tangga, tetapi juga sebagai bagian penting dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga. (Nasution, 2017)

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja juga dipengaruhi oleh perubahan sosial dan kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat. Tingginya

biaya hidup menyebabkan banyak perempuan harus ikut bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga. Bahkan dalam beberapa kondisi, perempuan menjadi tulang punggung keluarga karena penghasilan suami tidak mencukupi atau karena perempuan harus menanggung kebutuhan keluarga secara mandiri. (Soleman et al., 2022)

Di sisi lain, kapitalisme tidak hanya membuka ruang kerja bagi perempuan, tetapi juga melahirkan berbagai bentuk eksploitasi terhadap perempuan pekerja. Perempuan sering dijadikan tenaga kerja murah dengan upah rendah, jam kerja panjang, dan perlindungan kerja yang minim. Dalam sistem kapitalisme, perempuan kerap ditempatkan sebagai kelompok pekerja yang rentan karena kebutuhan ekonomi yang mendesak membuat mereka sulit menolak kondisi kerja yang tidak adil. (Nur Indah Amelia, 2025).

Selain memanfaatkan tenaga kerja perempuan dalam sektor produksi, sistem kapitalisme juga membentuk pola konsumsi yang menjadikan perempuan sebagai bagian dari kepentingan ekonomi pasar. Perempuan tidak hanya diposisikan sebagai pekerja, tetapi juga sebagai target konsumsi dan simbol keberhasilan sosial dalam budaya modern. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan dalam sistem kapitalisme sering ditempatkan sebagai bagian dari kepentingan ekonomi pasar, baik sebagai tenaga kerja maupun objek konsumsi.

Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa sistem kapitalisme tidak sekadar melibatkan perempuan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga membentuk struktur sosial yang menempatkan perempuan pada posisi kerja yang rentan dan subordinatif. Dalam praktiknya, perempuan sering diarahkan pada pekerjaan dengan upah rendah dan perlindungan minim karena dianggap lebih mudah dikendalikan dalam sistem kerja kapitalistik. Temuan ini sejalan dengan teori gender yang menjelaskan bahwa budaya patriarki menyebabkan perempuan tetap berada pada posisi subordinat meskipun telah terlibat dalam sektor publik. Dengan demikian, keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak selalu menunjukkan terciptanya keadilan bagi perempuan, tetapi dalam banyak kasus justru memperlihatkan bentuk baru eksploitasi terhadap perempuan pekerja dalam sistem kapitalisme modern.

2. Faktor Perempuan Bekerja di Era Kapitalisme

Meningkatnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja di era kapitalisme dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Faktor utama yang mendorong perempuan bekerja adalah tuntutan kebutuhan ekonomi keluarga yang semakin meningkat. Tingginya biaya hidup menyebabkan banyak perempuan harus ikut membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena penghasilan suami tidak lagi mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan dalam beberapa kondisi, perempuan menjadi tulang punggung keluarga akibat perceraian, kematian suami, atau kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. (Soleman et al., 2022)

Fenomena perempuan bekerja menunjukkan bahwa perubahan ekonomi modern telah mengubah pola pembagian peran dalam keluarga. Perempuan tidak lagi

hanya diposisikan sebagai pendamping dalam rumah tangga, tetapi juga menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas ekonomi keluarga ketika kebutuhan hidup semakin meningkat.

Selain faktor ekonomi, meningkatnya tingkat pendidikan perempuan juga menjadi penyebab meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja. Pendidikan memberikan peluang bagi perempuan untuk memperoleh pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup keluarga. Perempuan modern tidak lagi hanya diposisikan dalam wilayah domestik, tetapi juga memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai sektor publik seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, dan sektor jasa lainnya. (Hakimi et al., 2024)

Kapitalisme juga membentuk pola kehidupan masyarakat yang menempatkan keberhasilan ekonomi sebagai ukuran kesejahteraan keluarga. Kondisi tersebut mendorong seluruh anggota keluarga, termasuk perempuan, untuk ikut terlibat dalam aktivitas ekonomi. Perempuan akhirnya tidak hanya menjalankan fungsi sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga dituntut produktif di ruang publik demi mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga. (Nur Indah Amelia, 2025)

Di sisi lain, sebagian perempuan bekerja sebagai bentuk aktualisasi diri dan pengembangan potensi yang dimiliki. Perempuan memiliki keinginan untuk memperoleh kemandirian ekonomi, pengalaman sosial, dan kesempatan mengembangkan kemampuan diri melalui pekerjaan. Namun dalam realitasnya, sebagian besar perempuan tetap bekerja karena adanya tekanan ekonomi dan tuntutan kebutuhan hidup yang semakin besar.

Selain faktor ekonomi, sebagian perempuan bekerja karena adanya kebutuhan aktualisasi diri dan keinginan memperoleh pengakuan sosial di masyarakat. Perempuan tidak lagi hanya dipandang sebagai pelengkap rumah tangga, tetapi juga sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi keluarga. (Sabariman, 2019)

Berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak dapat dipisahkan dari perubahan sosial dan tekanan ekonomi masyarakat modern. Kondisi ekonomi yang semakin kompleks menyebabkan perempuan tidak hanya berperan dalam wilayah domestik, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi keluarga.

3. Beban Ganda dan Eksploitasi Perempuan Pekerja

Keterlibatan perempuan dalam dunia kerja tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab domestik yang selama ini dilekatkan kepada perempuan. Perempuan pekerja tetap dituntut mengurus rumah tangga, mendidik anak, dan melayani keluarga meskipun mereka juga bekerja di luar rumah. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan mengalami beban ganda, yaitu menjalankan peran domestik dan publik secara bersamaan. (Soleman et al., 2022)

Budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat menyebabkan perempuan tetap dibebani tanggung jawab domestik meskipun mereka juga bekerja di ruang publik.

Perempuan tidak hanya menjalankan pekerjaan sebagai pencari nafkah tambahan, tetapi juga tetap bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan kebutuhan keluarga sehingga beban kerja perempuan menjadi lebih tinggi. (M. Riadul Minan, Baiq Ratna Mulhimmah, 2025)

Beban ganda perempuan sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam masyarakat karena pengaruh budaya patriarki yang masih kuat. Perempuan dituntut tetap berhasil menjalankan tugas rumah tangga meskipun mereka juga memiliki tanggung jawab pekerjaan di ruang publik. Akibatnya, perempuan sering mengalami tekanan fisik dan psikologis akibat sulitnya membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga. (Santoso & Handoyo, 2025)

Media dan budaya sosial sering membentuk pandangan bahwa perempuan ideal adalah perempuan yang mampu berhasil dalam pekerjaan sekaligus tetap menjalankan tugas domestik secara baik. Pandangan tersebut menyebabkan beban ganda perempuan sering dianggap sebagai sesuatu yang wajar dalam masyarakat. (Himmah & Fadhlulloh, 2026) Dalam realitasnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tekanan sosial untuk menjalankan peran publik dan domestik secara bersamaan.

Keberhasilan perempuan sering diukur berdasarkan kemampuan mencapai stabilitas ekonomi dan keberhasilan karier di ruang publik tanpa meninggalkan tanggung jawab domestiknya. Kondisi tersebut menyebabkan perempuan tidak hanya menghadapi tuntutan ekonomi, tetapi juga tekanan sosial untuk mampu menjalankan berbagai peran secara bersamaan. Akibatnya, perempuan sering berada pada posisi yang rentan terhadap kelelahan fisik, tekanan psikologis, dan eksploitasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.

Konflik peran ganda yang dialami perempuan pekerja tidak hanya berdampak pada kelelahan fisik, tetapi juga memengaruhi kondisi psikologis perempuan. Perempuan rentan mengalami stres, tekanan emosional, dan konflik keluarga akibat sulitnya membagi tanggung jawab antara pekerjaan dan rumah tangga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa beban ganda perempuan tidak hanya menjadi persoalan sosial, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan mental perempuan pekerja. (Nur Indah Amelia, 2025)

Meskipun menghadapi peran ganda, sebagian perempuan mampu mencapai kesejahteraan psikologis melalui kemampuan mengelola lingkungan, membagi peran, dan membangun dukungan keluarga. Dukungan sosial dan kemampuan adaptasi menjadi faktor penting yang membantu perempuan menjalankan peran publik dan domestik secara seimbang. (Cito Meriko, 2019)

Konflik peran ganda perempuan pekerja dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga dan pekerjaan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perempuan pekerja membutuhkan strategi coping, dukungan keluarga, dan kemampuan manajemen waktu agar mampu menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. (Dian Afif Arifah et al., 2024)

Selain beban ganda, perempuan pekerja juga rentan mengalami eksploitasi

dalam sistem kapitalisme. Banyak perempuan menerima upah yang tidak sebanding dengan beban kerja yang dijalankan. Bahkan terdapat perempuan pekerja yang tidak memperoleh perlindungan kerja yang layak, fasilitas kesehatan, hak maternitas, dan keamanan kerja yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kapitalisme sering menjadikan perempuan sebagai objek produksi demi memperoleh keuntungan ekonomi sebesar-besarnya. (Nur Indah Amelia, 2025).

Sistem kapitalisme modern cenderung menempatkan produktivitas ekonomi di atas perlindungan kemanusiaan sehingga perempuan sering dipandang sebagai instrumen produksi dibanding subjek yang harus dilindungi hak dan martabatnya. Eksploitasi terhadap perempuan pekerja tidak hanya berbentuk ketidakadilan ekonomi, tetapi juga dapat berupa kekerasan dan pelecehan di lingkungan kerja. Relasi kuasa yang tidak seimbang antara atasan dan pekerja perempuan sering menyebabkan perempuan berada pada posisi yang sulit untuk menolak atau melaporkan tindakan kekerasan dan pelecehan yang dialaminya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap perempuan pekerja masih menjadi persoalan penting dalam dunia kerja modern. (First et al., 2024)

Sistem kapitalisme modern tidak hanya memengaruhi pola ekonomi keluarga, tetapi juga berdampak terhadap relasi dalam rumah tangga. Tuntutan produktivitas dan tekanan ekonomi menyebabkan perempuan harus menjalankan kerja domestik sekaligus terlibat dalam ekonomi formal. Kondisi tersebut memperbesar potensi konflik rumah tangga dan mengurangi kualitas hubungan emosional dalam keluarga. (Muhammadun, 2025)

Beban ganda dan eksploitasi terhadap perempuan pekerja menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam dunia kerja belum sepenuhnya disertai dengan pembagian peran yang adil dalam masyarakat. Perempuan masih menghadapi tekanan sosial, ekonomi, dan budaya yang menyebabkan mereka harus menjalankan tanggung jawab domestik dan publik secara bersamaan.

4. Perempuan Bekerja dalam Perspektif Hukum Islam

Islam memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam batas-batas syariat dan tidak melalaikan tanggung jawab dalam keluarga. Pada masa Rasulullah saw., perempuan juga terlibat dalam berbagai aktivitas sosial dan ekonomi seperti perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi. (Nasution, 2017)

Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa : 4/32:

.... لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

Terjemahnya :

“....Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan....” (QS. An-Nisa : 32)

Imam al-Tabari menjelaskan bahwa QS. An-Nisa ayat 32 menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama memperoleh balasan sesuai usaha dan amal yang mereka lakukan. (Al-Tabari, 2001)

Dalam Islam, terdapat beberapa profesi yang memang membutuhkan kehadiran perempuan, seperti bidan, dokter perempuan, guru perempuan, dan tenaga pelayanan sosial lainnya. Kehadiran perempuan dalam profesi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, perempuan diperbolehkan bekerja apabila pekerjaan tersebut memberikan manfaat dan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. (Nasution, 2017)

Allah Swt. berfirman dalam QS. At-Taubah : 9/71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ....

Terjemahnya :

“Orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain...” (QS. At-Taubah : 71)

Dalam menafsirkan QS. At-Taubah ayat 71, Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan mukmin memiliki hubungan saling menolong dan saling mendukung dalam kehidupan sosial. (Ibn Kathir, 2000) Relasi tersebut menunjukkan bahwa Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai mitra sosial yang bekerja sama dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat, bukan relasi yang bersifat subordinatif atau eksploitatif.

Dalam sejarah Islam, perempuan juga memiliki kontribusi dalam bidang ekonomi keluarga dan sosial kemasyarakatan. Keterlibatan perempuan dalam aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk kerja sama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga selama tetap menjaga tanggung jawab dan nilai-nilai syariat. (Firdaus et al., 2020) Khadijah ra. dikenal sebagai perempuan pebisnis sukses yang memiliki kontribusi besar dalam aktivitas ekonomi masyarakat Arab. Kekayaan dan usaha yang dimilikinya bahkan turut mendukung perjuangan dakwah Rasulullah saw. pada masa awal Islam. (Mu'awanah, 2022)

Ada berbagai faktor yang menyebabkan perempuan memilih bekerja, seperti kebutuhan ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, pengembangan potensi diri, hingga kondisi keluarga yang menuntut perempuan ikut mencari nafkah. Islam membolehkan perempuan bekerja selama pekerjaan tersebut tidak menyebabkan hilangnya kewajiban utama dalam keluarga dengan tetap menjaga kehormatan dan adab. (Wakirin, 2017)

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam, tetap menjaga etika dan kehormatan diri, serta tidak melalaikan tanggung jawab utama terhadap keluarga. Menurutnya, perempuan juga memiliki hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan publik selama aktivitas tersebut membawa kemaslahatan dan tidak menimbulkan kemudharatan. (Ma'mur, 2016)

Meskipun Islam membolehkan perempuan bekerja, Islam tetap memberikan

aturan terhadap perempuan yang bekerja di ruang publik. Perempuan diwajibkan menjaga aurat, menjaga kehormatan diri, menjaga adab pergaulan, menghindari khalwat, dan menghindari perilaku tabarruj. Selain itu, pekerjaan perempuan tidak boleh menyebabkan hilangnya tanggung jawab dalam mendidik anak dan menjaga keharmonisan keluarga. (Nasution, 2017)

Dalam perspektif Islam, tanggung jawab utama nafkah keluarga tetap berada pada laki-laki sebagai kepala keluarga. Namun dalam kondisi tertentu, perempuan diperbolehkan membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, terutama ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga atau ketika perempuan menjadi tulang punggung keluarga. Islam memandang pekerjaan perempuan sebagai bentuk ikhtiar yang dibolehkan selama tetap menjaga kehormatan dan keseimbangan dalam keluarga. (Jumena et al., 2018)

Berdasarkan perspektif hukum Islam, perempuan memiliki hak untuk bekerja dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial selama tidak mengabaikan ketentuan agama dan tanggung jawab keluarga. Islam memandang bahwa pekerjaan perempuan bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari kemaslahatan sosial yang harus dijalankan secara seimbang dan bermartabat.

5. Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Perempuan Pekerja

Negara memiliki tanggung jawab penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan pekerja. Perlindungan tersebut mencakup pemberian upah yang layak, jaminan keselamatan kerja, perlindungan terhadap hak maternitas, serta perlindungan dari kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja. Perlindungan terhadap perempuan pekerja merupakan bagian dari upaya menjaga martabat manusia dan mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. (Adhani, 2024)

Dalam perspektif Al-Qur'an, perempuan memiliki hak memperoleh hasil dan pendapatan dari pekerjaan yang dilakukannya. Islam menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama berhak memperoleh penghargaan yang layak atas usaha dan pekerjaan yang dilakukan tanpa adanya diskriminasi. (Noorchasanah, 2020)

Dalam perspektif hukum Islam kontemporer, kebijakan negara harus berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pekerja. Oleh karena itu, regulasi ketenagakerjaan tidak boleh hanya berorientasi pada kepentingan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan kesejahteraan dan keamanan perempuan dalam dunia kerja. Negara harus hadir untuk mencegah eksploitasi terhadap perempuan pekerja agar perempuan dapat bekerja secara aman tanpa kehilangan hak-hak dan kehormatannya sebagai manusia. (Adhani, 2024)

Dengan demikian, perlindungan terhadap perempuan pekerja tidak hanya menjadi persoalan ketenagakerjaan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keadilan sosial dan martabat manusia. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan perempuan dapat bekerja secara aman, adil, dan memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya.

6. Relevansi Nilai Islam terhadap Problematika Perempuan Pekerja Kontemporer

Problematika perempuan pekerja di era kapitalisme menunjukkan bahwa perempuan sering berada pada posisi yang rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan beban ganda. Perempuan tidak hanya dituntut aktif dalam sektor publik untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga tetap dibebani tanggung jawab domestik dalam rumah tangga. Kondisi tersebut menyebabkan banyak perempuan mengalami tekanan fisik, mental, dan sosial akibat sulitnya menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga. (Cito Meriko, 2019)

Dalam konteks tersebut, nilai-nilai Islam memiliki relevansi penting sebagai landasan moral dan sosial dalam memandang perempuan pekerja. Syariat Islam tidak menutup ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan ekonomi selama tetap memperhatikan adab pergaulan dalam Islam. Islam memandang pekerjaan perempuan sebagai bagian dari ikhtiar dalam memenuhi kebutuhan hidup dan memberikan kemaslahatan bagi keluarga maupun masyarakat. (Nasution, 2017) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Islam tetap memberikan ruang kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial secara proporsional.

Islam juga memberikan keseimbangan antara peran publik dan domestik perempuan. Perempuan diperbolehkan bekerja, tetapi tetap memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keluarga dan mendidik generasi. Oleh karena itu, Islam tidak memandang perempuan hanya sebagai alat produksi ekonomi sebagaimana yang sering terjadi dalam sistem kapitalisme, tetapi sebagai manusia yang harus dijaga kehormatan, keselamatan, dan martabatnya. (Nasution, 2017)

Meskipun Islam memberikan ruang partisipasi bagi perempuan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga nilai-nilai syariat dan keseimbangan tanggung jawab dalam keluarga. Namun, Islam juga menolak kebebasan tanpa batas yang dapat menghilangkan fitrah dan tanggung jawab perempuan dalam keluarga. Oleh karena itu, konsep kesetaraan dalam Islam tidak dimaknai sebagai persamaan mutlak, tetapi sebagai keseimbangan antara hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap martabat perempuan. (Zulfahani, 2012)

Nilai-nilai Islam juga menolak segala bentuk eksploitasi terhadap perempuan pekerja. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja, pemberian upah yang layak, perlindungan terhadap keselamatan pekerja, dan penghormatan terhadap hak-hak perempuan. Dalam perspektif hukum Islam, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan yang mampu melindungi perempuan pekerja dari diskriminasi, kekerasan, dan ketidakadilan dalam dunia kerja. (Adhani, 2024)

Islam menempatkan hubungan kerja dalam prinsip keadilan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, perempuan pekerja tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif ataupun dieksploitasi demi kepentingan ekonomi semata karena setiap pekerja memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan

perlakuan yang manusiawi. (Firdaus et al., 2020)

Dengan demikian, nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang kuat terhadap problematika perempuan pekerja kontemporer. Islam tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja, tetapi juga menghadirkan prinsip perlindungan, keseimbangan, dan keadilan agar perempuan dapat berpartisipasi dalam dunia kerja tanpa kehilangan kehormatan dan hak-haknya sebagai manusia.

Dalam menghadapi problematika sosial kontemporer, hukum Islam tidak hanya bertumpu pada teks wahyu semata, tetapi juga memerlukan peran akal dalam memahami perubahan sosial yang terus berkembang. (Jumarni et al., 2024) Hukum Islam memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap perubahan sosial agar mampu memberikan solusi terhadap problematika perempuan pekerja di era modern.

Dengan demikian, nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang kuat dalam menjawab problematika perempuan pekerja di era kapitalisme modern. Islam tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja, tetapi juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap martabat, keselamatan, dan keseimbangan kehidupan perempuan. Oleh karena itu, penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan kebijakan negara menjadi penting agar perempuan dapat berpartisipasi dalam dunia kerja tanpa mengalami eksploitasi dan ketidakadilan.

KESIMPULAN

Perempuan pekerja di era kapitalisme merupakan bagian dari perubahan sosial dan ekonomi masyarakat modern. Meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan banyak perempuan terlibat dalam dunia kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, bahkan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga. Namun di balik keterlibatan tersebut, perempuan juga menghadapi berbagai persoalan seperti beban ganda, diskriminasi, eksploitasi tenaga kerja, ketimpangan upah, serta minimnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan pekerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja modern sering kali belum sepenuhnya memberikan ruang kerja yang adil dan aman bagi perempuan.

Dalam perspektif hukum Islam, perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut dilakukan dalam batas-batas syariat dan tidak melalaikan tanggung jawab dalam keluarga. Islam memandang bahwa perempuan dapat berkontribusi dalam kehidupan sosial dan ekonomi, terutama pada bidang-bidang yang membutuhkan kehadiran perempuan seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Meskipun demikian, Islam tetap menekankan pentingnya menjaga kehormatan, aurat, adab pergaulan, serta keseimbangan antara peran publik dan domestik perempuan.

Nilai-nilai Islam memiliki relevansi penting terhadap problematika perempuan pekerja kontemporer karena Islam tidak hanya memberikan ruang bagi perempuan untuk bekerja, tetapi juga menekankan perlindungan terhadap martabat, keselamatan, dan hak-hak perempuan pekerja. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan kebijakan ketenagakerjaan yang mampu melindungi perempuan pekerja dari eksploitasi, diskriminasi, kekerasan, serta ketidakadilan dalam dunia kerja. Selain itu, reformasi sistem kerja yang lebih ramah keluarga dan berkeadilan juga diperlukan

untuk mengurangi beban ganda perempuan pekerja. Pendidikan keluarga mengenai pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan juga penting untuk membangun ketahanan keluarga serta menciptakan lingkungan sosial yang lebih harmonis, aman, dan bermartabat bagi perempuan pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhani, M. R. (2024). Memenuhi Kebutuhan Keluarga Dalam Perspektif Islam. *Sipakalebbi*, 8(1), 1–10.
- Al-Tabari, A. J. M. bin J. (2001). *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān* (I). Dar Hajr.
- Azizah, N. (2020). Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Dunia Dan Islam Berkesetaraan Gender. *JSGA*, 02(02), 21–35.
- Cito Meriko, O. H. (2019). Kesejahteraan Psikologis Perempuan Yang Berperan Ganda. *Seurune, Jurnal Psikologi Unsyiah*, 2(1), 106–108.
- Dian Afif Arifah, Ratih Andhika Akbar, & Siti Ma'rifah. (2024). Analisis Konflik Peran Ganda Dan Penerapan Strategi Coping Pada Ibu Bekerja. *Healthy Tadulako Journal (Jurnal Kesehatan Tadulako)*, 10(4), 525–534.
- Firdaus, Saputra, R., Susanti, P., Desminar, & Nurazizah. (2020). Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga. *Jurnal Kajian Dan Pengembangan Umat*, 3(2), 1–15.
- First, D., Putri, T., Kekerasan, R., Kerja, T., First, D., & Putri, T. (2024). Realitas Kekerasan Dan Pelecehan Perempuan Di Tempat Kerja: Analisis Perspektif Gender. *Kafa'ah: Journal of Gender Studies*, 14(1), 38–46. <https://doi.org/10.15548/jk.v14i1.683>
- Hakimi, A. R., Citra Widyasari, S., Mukarramah, & Sari, R. P. N. (2024). Legal Policy for Women Workers in Indonesia: a Review of Contemporary Islamic Law. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 3(1), 66–94. <https://doi.org/10.32332/milrev.v3i1.9023>
- Himmah, R., & Fadhlulloh, Q. H. (2026). Peran Ganda Perempuan Pekerja : Analisis Semiotika Representasi Gender dan Implikasi Hukum Ketenagakerjaan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 7441–7456.
- Ibn Kathir. (2000). *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm* (I). Muassasah Qurtubah dan Maktabah Aulad al-Syaikh.
- Jumarni, Misbahuddin, & Kurniati. (2024). Integration Between Reason and Revelation in the. *Jurnal Al-Dustur*, 7(2), 1–10.
- Jumena, J., Arifin, D., & Sa'diyah, H. (2018). Pemberdayaan Pekerja Perempuan Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 71. <https://doi.org/10.24235/jm.v3i1.2938>
- Komnas Perempuan. (2026). *Siaran Pers Komnas Perempuan Peluncuran Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2025*. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-peluncuran-catatan-tahunan-kekerasan-terhadap-perempuan-2025>
- M. Riadul Minan, Baiq Ratna Mulhimmah, Z. (2025). Dinamika Peran Perempuan Buruh Tani dalam Mempertahankan Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga. *Jurnal Pendidikan IPS, Vol. 15*(IV), 39–48. <https://doi.org/10.37630/jpi.v12i1.617>
- Ma'mur, J. (2016). Moderatisme Fikih Perempuan Yusuf Al-Qardhawi. *Muwazah*, 8(1), 1–13. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v8i1.725>
- Mu'awanah, S. (2022). Peluang Bisnis Bagi Wanita Di Era Digital Dalam Perspektif Al-Quran: Studi Keberhasilan Khadijah Dalam Berbisnis. *Nida' Al-Quran*, 20(1), 39–50. <https://ejurnal.iq.ac.id/index.php/nidaquran>
- Muhammadun, N. L. F. (2025). Keluarga Dalam Pusaran Kapitalisme: Analisis Dampak Ekonomi Terhadap Keluarga Muslim. *Jebesh*, 3, 90–100.
- Nasution, H. S. (2017). Wanita Bekerja dalam Pandangan Islam. *Almufida*, 2(2), 280–286. <https://doi.org/10.62083/ypr5rm41>
- Noorhasanah, N. (2020). Hak Pendapatan Pekerja Perempuan dalam Al-Qur'an. *Khazanah*

- Theologia*, 2(2), 111–118. <https://doi.org/10.15575/kt.v2i2.9207>
- Nur Indah Amelia, A. (2025). Perempuan Dan Kapitalisme. *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 9(2), 257–269.
- Ria Irwana, Said Syarifuddin, & Muhammad Syahrul. (2023). Ketentuan Perempuan Bekerja Dalam Islam Untuk Membantu Perekonomian Keluarga (Istri Yang Bekerja Sebagai Driver Ojek Online). *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies*, 2(1), 208–213. <https://doi.org/10.58738/qanun.v2i1.375>
- Sabariman, H. (2019). Perempuan Pekerja (Status Dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia). *Jurnal Analisa Sosiologi*, 2019(2), 162–175.
- Saguni, F. (2020). Dinamika Gender Dalam Masyarakat. *Musawa*, 12(2), 207–227.
- Santoso, M. D. S. P., & Handoyo, P. (2025). Peran Ganda Perempuan Bekerja Di Sektor Publik (Studi Kasus Pada Keluarga Broken Di Wilayah Kota Madiun). *Paradigma*, 14(1), 131–140. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/paradigma/article/view/68849>
- Soleman, F., Antuli, S. A. K., & Sandimula, N. S. (2022). Peran Perempuan dalam Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga di Kelurahan Tuminting. *SPECTRUM: Journal of Gender and Children Studies*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/10.30984/spectrum.v2i2.413>
- Tebaldi, C. (2021). Make Women Great Again: women, misogyny and anti-capitalism on the right. *Fast Capitalism*, 18(1). <https://doi.org/10.32855/fcapital.202101.007>
- Wakirin. (2017). Wanita Karir Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Islam Al I'tibar*, 4(1), 1–14.
- Zulfahani, H. (2012). Perempuan dan Feminisme dalam Perspektif Islam. *Muwâzâh*, 1, 70–86. <https://media.neliti.com/media/publications/153204-ID-perempuan-dan-feminisme-dalam-perspektif.pdf>